



***Post-truth* dan Tantangannya dalam Dunia Pendidikan**

Achmad Rifki Ibnu Maulana,¹ Ahsan Ahmad Syarif,²

^{1,2} Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya

Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

¹ riffki688@gmail.com

Abstract:

The post-truth phenomenon marks a fundamental shift in how society perceives truth, where emotions and subjective opinions overshadow objective facts. In the field of education, this condition undermines scientific authority, trust in knowledge institutions, and students' critical thinking abilities. This article analyzes the epistemological crisis caused by post-truth through the lens of philosophy of science, drawing on the ideas of Plato, Immanuel Kant, and Karl Popper. These thinkers offer theoretical frameworks to understand and respond to disinformation: from the realm of ideal forms and absolute truth (Plato), the autonomy of reason and freedom of thought (Kant), to the spirit of critical inquiry and falsifiability (Popper). This study employs a qualitative method with a library research approach, examining classical and contemporary philosophical texts alongside secondary data on digital disinformation, the crisis of trust in science, and weak media literacy among students. The analysis reveals that post-truth is not merely an information crisis, but a deeply rooted epistemological crisis. Therefore, education must reinforce critical literacy, philosophical reflection, and a scientific mindset. Integrating philosophy of science into the curriculum is a crucial transformative strategy to strengthen the intellectual resilience of younger generations in navigating an increasingly complex and distracting post-truth era.

Keywords: post-truth, philosophy of science, education, epistemology, critical thinking

Abstrak:

Fenomena post-truth menandai pergeseran cara masyarakat memahami kebenaran, saat emosi dan opini subjektif lebih dominan daripada fakta objektif. Dalam pendidikan, kondisi ini melemahkan otoritas ilmiah, kepercayaan terhadap institusi pengetahuan, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Artikel ini menganalisis krisis epistemologis akibat

post-truth melalui perspektif filsafat ilmu, dengan merujuk pada gagasan Plato, Immanuel Kant, dan Karl Popper. Ketiganya menawarkan kerangka teoretis untuk memahami dan merespons disinformasi: dari dunia ide dan kebenaran ideal (Plato), otonomi rasional dan kebebasan berpikir (Kant), hingga semangat kritis dan falsifikasi (Popper). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, melalui kajian teks-teks filosofis dan data sekunder terkait disinformasi digital, krisis kepercayaan terhadap sains, serta lemahnya literasi media di kalangan pelajar. Analisis menunjukkan bahwa post-truth bukan sekadar krisis informasi, melainkan krisis epistemologi yang mengakar. Oleh karena itu, pendidikan harus memperkuat literasi kritis, refleksi filosofis, dan pembudayaan sikap ilmiah. Integrasi filsafat ilmu dalam kurikulum menjadi strategi penting untuk membangun ketahanan intelektual generasi muda menghadapi era pasca-kebenaran.

Kata kunci: post-truth, filsafat ilmu, pendidikan, epistemologi, berpikir kritis

Pendahuluan

Era *post-truth* (pasca-kebenaran) merujuk pada kondisi sosial ketika fakta objektif tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam membentuk opini publik, melainkan digantikan oleh emosi dan kepercayaan pribadi. Istilah ini mendapatkan perhatian global setelah dinobatkan sebagai *Word of the Year* oleh Oxford Dictionaries pada tahun 2016, yang menggambarkan pergeseran orientasi masyarakat dari rasionalitas menuju sentimen dan intuisi sebagai dasar penilaian kebenaran.¹ Dalam konteks filosofis, *post-truth* ditandai oleh tiga karakteristik utama: melimpahnya informasi, dominasi emosi atas fakta, dan preferensi terhadap sensasi ketimbang substansi.² Konsekuensinya, masyarakat kian sulit membedakan antara informasi yang dapat diverifikasi secara ilmiah dengan opini atau narasi yang bersifat manipulatif.

¹ Oxford Dictionaries, Word of the Year 2016, <https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016>.

² Muhammad Nur Huda & Yunia Tiara Riski, "Menghindari Berita Hoaks dengan Cara Berpikir Filsafat," *Maharsi* (2023).

Fenomena ini bukan hanya bersifat global, tetapi juga nyata di Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi digital, Masyarakat terutama generasi muda, menjadi semakin rentan terhadap disinformasi yang tersebar melalui media sosial dan platform digital lainnya. Studi CSSN (*Climate Social Science Network*) mencatat bahwa disinformasi berkembang pesat di berbagai sektor, termasuk politik, agama, dan pendidikan.³ Di Indonesia sendiri, literasi digital yang rendah, minimnya pelatihan verifikasi fakta, serta rendahnya kesadaran epistemik di kalangan pelajar memperparah situasi ini.⁴ Sebagai akibatnya, banyak siswa dan mahasiswa menjadikan konten viral atau narasi media sosial sebagai rujukan utama, menggantikan sumber ilmiah yang kredibel.

Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi dunia pendidikan. Dalam sistem pendidikan yang ideal, lembaga dan pendidik diharapkan menjadi benteng terakhir dalam menjaga dan menyebarkan pengetahuan yang terverifikasi. Namun, dalam era pasca-kebenaran, kepercayaan terhadap otoritas akademik mulai runtuh. Sejumlah artikel mengungkap bahwa guru dan dosen kini kerap menghadapi keraguan dari siswa terhadap materi yang diajarkan karena dianggap tidak sesuai dengan “narasi populer” di media sosial.⁵ Akibatnya, pendidikan tidak lagi menjadi ruang pembebasan intelektual, melainkan medan pertarungan antara fakta ilmiah dan opini yang dibentuk oleh algoritma digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya fokus pada transfer informasi, tetapi juga membekali peserta didik dengan perangkat epistemologis untuk memahami, memilah, dan menilai informasi secara kritis dan bertanggung jawab.

³ “Understanding and Coping with the ‘Post-truth’ Era,” *CSSN Report* (2020).

⁴ Zainul Adzfar & Badrul Munir Chair, “Kebenaran di Era *Post-truth* dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah,” *Fikrah* (2023).

⁵ Parker, “Post-truth and the Rhetoric of ‘Following the Science’,” *Journal of Philosophical Studies* (2023).

Berdasarkan kerangka di atas, artikel ini bertujuan mendeskripsikan fenomena *post-truth* beserta ciri-cirinya, serta menganalisis implikasinya dalam dunia pendidikan. Kajian ini akan menggabungkan perspektif klasik dan kontemporer tentang kebenaran: misalnya gagasan Plato⁶ dan Kant⁷ mengenai dasar kebenaran obyektif, serta pendekatan kritis Popper.⁸ Dengan demikian, artikel ini diharapkan mengisi kesenjangan pemahaman tentang pasca-kebenaran dan menawarkan rekomendasi pedagogis yang relevan untuk menghadapi tantangan era ini.

Tinjauan Teoritis Filsafat Ilmu

Fenomena *post-truth* yang mereduksi pentingnya fakta objektif dalam kehidupan publik tidak dapat dilepaskan dari diskursus epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, dan validitas pengetahuan. Filsafat ilmu memberikan kerangka normatif untuk membedakan antara pengetahuan yang sah dan yang menyesatkan, antara metode ilmiah dan klaim spekulatif. Dalam konteks pendidikan, epistemologi berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis siswa agar tidak terperangkap dalam disinformasi.

1. Plato

Plato (427–347 SM) adalah filsuf Yunani Kuno, murid Socrates dan guru Aristoteles, yang merumuskan teori pengetahuan dasar dalam filsafat Barat. Ia mengenalkan *episteme* (pengetahuan sejati) dan *doxa* (pendapat/kepercayaan), dengan dunia nyata (fenomena) sebagai bayangan dunia Ide yang abadi. Dalam Republik, Plato menggambarkan

⁶ Plato, *Republik* (Athena: Ca., sekitar 360 SM) – Alegori Gua menekankan perbedaan antara pengetahuan sejati dan ilusi opini.

⁷ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason* (1781) – Menjelaskan syarat-syarat rasionalitas dan struktur pengetahuan.

⁸ Karl R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (1959) – Menekankan pentingnya pengujian kritis (falsifikasi) dalam mendekati kebenaran ilmiah.

manusia dalam “gua” yang hanya melihat bayangan, sehingga hanya memiliki pendapat (*doxa*) tanpa pengetahuan hakiki tentang bentuk ideal (Ide). Menurut Plato, pengetahuan (*episteme*) adalah *justified true belief* yang berakar pada bentuk-bentuk esensial; sementara semua pengetahuan indrawi sekadar opini yang bisa salah. Pemisahan antara dunia Ide yang pasti dan dunia indra yang menipu menekankan pentingnya metode dialektika (dialog kritis) untuk mencapai kebenaran mutlak. Kontribusi Plato dalam epistemologi ini menjadi landasan awal pemikiran filsafat ilmu modern, yaitu upaya membedakan asumsi atau opini belaka dari pengetahuan yang dibuktikan secara rasional.

Pandangan Plato sangat relevan menghadapi fenomena *post-truth* (“pasca-kebenaran”), di mana emosi dan keyakinan subjektif sering mengalahkan data objektif. Plato sudah memperingatkan bahaya retorika yang menghasilkan persuasi tanpa dasar kebenaran yang mirip kondisi *post-truth* sekarang. Ia menolak metode retorika sofistik yang hanya mencari kemenangan argumen demi popularitas, karena membuat orang terbawa opini tanpa bukti. Sebaliknya, Plato menekankan bahwa kebenaran harus dicapai melalui penalaran kritis dan dialog terbuka. Dalam konteks *post-truth*, warisan Plato mengingatkan kita agar tak mudah terjebak “*doxa*” tanpa *episteme*; bahwa adu argumen harus didasari penelaahan bukti, bukan semata pengaruh sosial atau citra.

Dalam pendidikan, pemikiran Plato mendorong pengajaran berbasis dialog dan metode *Sokratik* untuk mengasah berpikir kritis. Misalnya, guru dapat melibatkan siswa dalam perdebatan terstruktur yang menuntut mereka menjustifikasi pendapatnya, selaras dengan anjuran Socrates/Plato untuk menelisik kebenaran melalui pertanyaan mendalam. Penelitian pendidikan modern mencatat metode *Sokratik*

sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan kata lain, kelas yang mengadopsi gaya dialog filosofis ala Plato membantu siswa membedakan antara “kebenaran” berdasarkan bukti versus pendapat belaka, sebuah bekal penting dalam era *post-truth*.

2. Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724–1804) adalah tokoh Sentral Pencerahan Jerman yang menyintesis tradisi rasionalisme dan empirisme. Dalam *Critique of Pure Reason* ia berargumen bahwa akal manusia memberi struktur pada pengalaman: konsep ruang dan waktu serta kategori pemikiran memungkinkan ilmu alam menjadi mungkin. Ia juga memperkenalkan pengetahuan sintetis *a priori* (misalnya, proposisi matematika dan prinsip fisika) yang sekaligus bergantung dan mendahului pengalaman. Fundamentalnya, Kant meyakini bahwa kebebasan dan otonomi rasional merupakan basis kebenaran; akal adalah sumber hukum alam dan moral, sehingga ilmu pengetahuan, etika, dan agama dapat memiliki dasar konsisten bersama.

Pandangan Kant sangat relevan dalam menghadapi *post-truth*. Kant menekankan pentingnya berpikir mandiri (*Sapere Aude*) dan kritik rasional terhadap klaim apa pun. Dalam esainya ‘What is Enlightenment?’ ia mendefinisikan Pencerahan sebagai “keluarnya manusia dari kematangan yang dicipta sendiri; kematangan adalah ketidakmampuan menggunakan pemahamannya sendiri tanpa bimbingan orang lain”. Dengan kata lain, Kant mendorong setiap individu menggunakan akalnya untuk menilai kebenaran secara mandiri, bukannya menerima mentah-mentah pendapat otoritas (yang sejalan dengan semangat Otonomi dan Kebebasan). Kant juga menggarisbawahi bahwa setiap klaim kebenaran harus diuji secara kritis dan hanya dapat diterima jika dibuktikan dengan argumentasi yang

logis. Dengan kata lain, Kant mendorong setiap individu menggunakan akalinya untuk menilai kebenaran secara mandiri, bukannya menerima mentah-mentah pendapat otoritas (yang sejalan dengan semangat Otonomi dan Kebebasan). Ia berpendapat bahwa kebohongan merusak harkat orang lain dan melemahkan kepercayaan sosial, sehingga disinformasi yang bersifat menyesatkan tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga membahayakan kebebasan dan kemampuan membuat keputusan rasional.

Dalam pendidikan, ideal Kant adalah membebaskan pemikiran siswa. Pendidikan harus mendorong kemandirian intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan penggunaan nalar. Guru seharusnya memfasilitasi siswa untuk mempertanyakan asumsi, berdiskusi argumen, dan mengevaluasi bukti sendiri (serupa ajakan *Sapere Aude* Kant). Dengan demikian, pelajaran berhitung data dan logika bukan hanya menghafal fakta, tetapi melatih murid menguji klaim secara rasional. Pendekatan semacam ini menyiapkan siswa agar tidak pasif menerima narasi baku, melainkan aktif mencari dan menilai informasi, sesuai semangat Pencerahan Kant. Pandangan Kant ini penting di era modern karena menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai fakta ilmiah diproses melalui kerangka berpikir manusia, sehingga interpretasi kebenaran bisa berbeda di bawah kerangka konseptual yang berbeda.

3. Karl Popper

Sir Karl Popper (1902–1994) adalah filsuf ilmu abad ke-20 yang sangat berpengaruh. Ia terkenal dengan metodologi falsifikasi, yang menjadi kriteria demarkasi ilmu dari non-ilmu. Popper menolak verifikasi sebagai tolok ukur kebenaran dan berkata teori ilmiah seharusnya meramalkan konsekuensi yang bisa berisikan kebenaran

yang bertentangan dengan pengamatan di masa depan. Dengan falsifikasi ini, ilmu berproses melalui tebak-tebakan (*conjectures*) dan sanggahan (*refutations*): teori dihadapkan dengan eksperimen berani yang berupaya menolaknya, sehingga teori yang tetap bertahan menjadi semakin kuat. Popper juga berpendapat bahwa teori yang “diimunisasi” dengan hipotesis tambahan tanpa kemungkinan diuji ulang tidak lagi ilmiah; teori seperti itu tak lagi memberikan prediksi falsifikatif. Ia menegaskan bahwa ilmuwan terus-menerus harus mengoreksi dan menguji, sehingga ilmu selalu bersifat terbuka dan sementara.

Relevansi pemikiran Popper terhadap *post-truth* terletak pada sikap kritisnya terhadap klaim kebenaran. Dalam era *post-truth*, banyak klaim dipertahankan dengan menghindari bukti (dimuat sebagai “fakta alternatif”), mirip dengan apa yang Popper sebut teori *ad hoc* yang kekal tak tergoyahkan. Menurut Popper, pola semacam itu justru mematikan ilmu karena melanggar proses uji kritis; analoginya, keyakinan *post-truth* seringkali bersifat sewenang-wenang dan menolak sanggahan bukti. Oleh karena itu, warisan Popper mendorong masyarakat untuk senantiasa menguji informasi baru, membedakan klaim ilmiah yang dapat diuji secara empirik dari propaganda tak terbantahkan. Dalam konteks pendidikan, ajaran Popper berarti menanamkan kebiasaan bertanya kritis: guru diminta mengajak siswa tidak hanya belajar “kebenaran” yang mapan, tetapi juga mengetahui bagaimana cara menguji dan menantanginya. Sebagai contoh, seorang pendidik bisa menantang siswa untuk merancang eksperimen sederhana yang memverifikasi atau mematahkan sebuah hipotesis, mencerminkan ajaran Popper untuk selalu siap mengganti teori lama dengan yang baru jika terbukti lebih baik. Popper sendiri mengkritik tradisi akademis yang hanya mendorong siswa melewati ujian daripada mencintai

pengetahuan. Dalam *The Open Society*, ia menyatakan bahwa banyak sekolah “mengajarkan siswa pengetahuan yang berguna hanya untuk melewati rintangan ujian, bukannya menumbuhkan cinta pada bidang studi dan semangat penyelidikan”. Oleh karena itu, pendidikan yang mempraktikkan pemikiran Popper hendaknya menumbuhkan gairah bertanya dan meneliti, bukan sekadar hafalan.

Berdasarkan uraian teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran para filsuf mengenai kebenaran dan pengetahuan memberikan dasar konseptual yang kokoh untuk memahami tantangan epistemologis pada era *post-truth*. Kerangka filsafat ilmu ini tidak hanya memperjelas batas antara pengetahuan ilmiah dan opini spekulatif, tetapi juga menegaskan pentingnya berpikir kritis dalam menanggapi disinformasi. Dengan demikian, tinjauan teoretis ini menjadi landasan untuk melanjutkan pembahasan mengenai implikasi konkret fenomena *post-truth* terhadap dunia pendidikan dan strategi pedagogis yang dapat diterapkan dalam meresponsnya secara efektif.

Dampak Era *Post-truth* terhadap Dunia Pendidikan

Era *post-truth* bukan semata fenomena linguistik atau wacana media, melainkan krisis epistemologis yang menggerogoti pondasi rasionalitas dalam masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Ketika kebenaran ilmiah mulai dipertanyakan atau digantikan oleh narasi emosional dan viral, maka pendidikan—sebagai institusi pencari dan penyebar kebenaran – menghadapi ancaman langsung. Bab ini membahas secara kritis dampak dari era *post-truth* terhadap dunia pendidikan, dengan mengaitkannya pada krisis otoritas pengetahuan, kaburnya batas antara fakta dan opini, serta meningkatnya polarisasi dalam ruang belajar. Setiap bagian dianalisis dengan mengacu pada kerangka filsafat ilmu yang telah dijabarkan sebelumnya.

1. Kepercayaan terhadap Ilmu Pengetahuan

Salah satu dampak paling nyata dari era *post-truth* adalah melemahnya kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan dan otoritas akademik. Dalam konteks pendidikan, hal ini terlihat dari meningkatnya ketidakpercayaan siswa terhadap materi ajar yang disampaikan guru atau dosen, terutama bila bertentangan dengan informasi viral yang mereka konsumsi di media sosial. Menurut Popper, otoritas ilmu tidak berasal dari status sosial atau popularitas, tetapi dari keterbukaan terhadap falsifikasi dan kritik. Namun dalam logika *post-truth*, informasi yang paling banyak dibagikan atau paling emosional justru dianggap paling benar, sehingga pengetahuan ilmiah yang berbasis bukti menjadi rentan diabaikan.

Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori *epistemic deference* (pengabaian terhadap otoritas epistemik) yang berkembang dalam filsafat sosial pengetahuan. Miranda Fricker menyebut adanya ketidakadilan epistemik ketika seseorang atau kelompok ditolak kapasitasnya sebagai pemberi pengetahuan yang sah. Dalam kelas, hal ini tampak ketika guru dianggap “kurang relevan” dibandingkan influencer di TikTok atau YouTube. Ketika otoritas ilmiah diruntuhkan oleh opini populer, maka epistemologi pendidikan mengalami kemunduran, kembali pada logika *doxa* sebagaimana dikritik oleh Plato sejak ribuan tahun lalu.

2. Kaburnya Batas Fakta dan Opini

Dalam atmosfer *post-truth*, batas antara fakta dan opini menjadi kabur. Informasi tidak lagi dinilai berdasarkan *verifikabilitasnya* (*verifiability*), melainkan berdasarkan seberapa baik ia selaras dengan keyakinan atau perasaan audiens. Kant menegaskan bahwa rasionalitas manusia hanya dapat berfungsi bila ia berani berpikir mandiri dan menguji klaim berdasarkan prinsip-prinsip logis. Namun ketika

informasi dikonsumsi dalam ruang digital yang didominasi algoritma—yang memperkuat bias konfirmasi—kemampuan berpikir kritis menjadi tumpul.

Fenomena ini dijelaskan secara rinci dalam studi Cass Sunstein mengenai *informational cascades* dan *echo chambers*, di mana individu cenderung mempercayai sesuatu bukan karena fakta, tetapi karena orang lain dalam kelompok mereka mempercayainya terlebih dahulu. Akibatnya, siswa dan pendidik hidup dalam “gelembung informasi” yang memperkuat pandangan mereka sendiri dan menolak perbedaan. Ketika proses belajar tidak lagi menekankan penyaringan informasi berdasarkan kriteria epistemik, maka pendidikan berubah menjadi ritual sosial yang dangkal, bukan ruang pencarian kebenaran yang otentik.

3. Polarisasi dan Disrupsi Proses Belajar

Dampak lain dari *post-truth* adalah meningkatnya polarisasi dan disrupsi dalam ruang kelas. Topik-topik yang bersifat ilmiah—seperti perubahan iklim, vaksinasi, atau sejarah sosial—kerap menjadi bahan perdebatan emosional karena dibingkai oleh narasi politik atau ideologis. Dalam banyak kasus, perdebatan ini tidak didasarkan pada data, melainkan pada identitas dan afiliasi kelompok.

Thomas Kuhn menjelaskan bahwa konflik dalam ilmu sering terjadi karena perbedaan paradigma, yakni kerangka berpikir yang mendasari bagaimana fakta ditafsirkan. Namun perbedaan paradigma ilmiah bersifat produktif bila disertai sikap terbuka terhadap anomali dan dialog. Dalam konteks *post-truth*, yang terjadi justru sebaliknya: penolakan total terhadap informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan. Hal ini serupa dengan yang dikritik Popper sebagai “teori imun terhadap kritik”—yakni sikap dogmatis yang menolak semua falsifikasi.

Kondisi ini menyebabkan ruang kelas menjadi medan ideologis, bukan laboratorium intelektual. Diskusi akademik tergantikan oleh retorika emosional; data digantikan narasi, dan guru dipaksa menjadi mediator konflik identitas. Pendidikan yang seharusnya membentuk daya nalar justru terperangkap dalam permainan simbolik pasca-kebenaran, di mana kemampuan menyentuh perasaan lebih penting dari akurasi argumen.

4. Ketergantungan Informasi pada Platform Komersial

Era digital menjadikan siswa sangat tergantung pada platform seperti Google, YouTube, TikTok, dan Instagram untuk mencari informasi. Namun, logika komersial dari platform-platform ini lebih mementingkan atensi pengguna ketimbang kualitas pengetahuan. Paul Feyerabend, dengan semangat pluralisme radikalnya, mungkin akan mendukung keragaman sumber pengetahuan; namun ia tetap menekankan pentingnya justifikasi dan rasionalitas.

Ketika siswa lebih mempercayai konten yang muncul di pencarian teratas Google daripada buku pelajaran atau jurnal ilmiah, maka sistem pendidikan menghadapi krisis orientasi epistemik. Michael Polanyi mengingatkan bahwa pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi informasi eksplisit; ia berakar pada komunitas praktik dan kepercayaan terhadap otoritas yang kompeten. Artinya, proses pembelajaran tidak cukup dengan akses ke informasi, tetapi harus ditopang oleh relasi pedagogis dan komunitas ilmiah yang membimbing siswa memahami mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan.

5. Reduksi Pendidikan Menjadi Proyek Konsumsi

Terakhir, era *post-truth* menggeser paradigma pendidikan dari pembentukan karakter intelektual menjadi konsumerisme informasi. Siswa ingin pengetahuan yang instan, visual, dan mudah dicerna.

Pendidikan menjadi semacam pasar pengetahuan, di mana guru bersaing dengan konten viral untuk memperebutkan atensi. Dalam konteks ini, pendidikan kehilangan misi transformatifnya.

Hal ini berlawanan dengan visi pendidikan sebagai *paideia*—pembentukan jiwa dan akal manusia—sebagaimana diidealkan oleh Plato. Pendidikan yang hanya melayani keinginan pasar informasi akan gagal membentuk individu yang mampu berpikir kritis, memiliki tanggung jawab epistemik, dan menghargai proses pencarian kebenaran. Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan pendidikan sebagai ruang praksis filosofis, tempat kebenaran, bukan popularitas, menjadi kompas utama.

Sintesis Filsafat Ilmu dan Strategi Pendidikan dalam Menghadapi Era *Post-truth*

Post-truth bukan hanya persoalan komunikasi dan informasi, tetapi gejala mendalam dari krisis epistemik yang mengancam jantung pendidikan. Dalam masyarakat pasca-kebenaran, fakta tidak lagi menjadi penentu akhir dalam pencarian pengetahuan, melainkan tunduk pada opini dan narasi emosional. Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang pembebasan intelektual, justru terjebak dalam turbulensi wacana yang tidak terverifikasi, diperparah oleh arus algoritma dan ekonomi atensi. Dalam konteks ini, filsafat ilmu bukan sekadar kajian teoritis, melainkan kompas moral dan metodologis untuk mengembalikan pendidikan pada misi sejatinya: menumbuhkan kecintaan pada kebenaran.

6. Literasi Kritis sebagai Perisai Epistemik

Strategi paling mendasar untuk membendung gelombang *post-truth* dalam pendidikan adalah membangun literasi kritis. Literasi ini melampaui kemampuan membaca dan menulis secara fungsional; ia

mencakup kesadaran reflektif terhadap struktur informasi, kemampuan mengevaluasi validitas sumber, serta keberanian untuk mempertanyakan narasi dominan.

Dalam semangat Kantian *Sapere Aude*—berani berpikir sendiri—literasi kritis berfungsi sebagai fondasi kebebasan berpikir. Pendidikan yang membina literasi kritis sejatinya membentuk otonomi nalar: siswa tidak sekadar menyerap informasi, tetapi juga menganalisis bias, menguji klaim, dan menghubungkannya dengan konteks sosial. Seperti dikatakan Kant, “pencerahan adalah keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri”. Dalam masyarakat digital saat ini, ketidakdewasaan itu muncul dalam bentuk konsumsi informasi tanpa pemeriksaan rasional—sebuah bentuk imaturitas intelektual yang dikultuskan oleh kenyamanan algoritma.

Contoh implementasi literasi kritis dapat dilihat dalam program-program sekolah di Jakarta yang melibatkan siswa membongkar hoaks di media sosial sebagai tugas literasi digital. Dalam aktivitas ini, siswa diminta membandingkan narasi dari media viral dengan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lalu mempresentasikan analisisnya secara argumentatif. Praktik ini secara nyata menunjukkan bahwa kemampuan memilah informasi adalah keterampilan epistemik, bukan sekadar aktivitas teknis.

7. Dialog Sokratik dan Metakognisi dalam Praktik Kelas

Gagasan Plato tentang pendidikan sebagai upaya mengeluarkan jiwa dari “gua” ilusi—yang digambarkan dalam alegori terkenalnya—sangat relevan dengan konteks hari ini. Dalam era pasca-kebenaran, “gua” itu berbentuk layar ponsel, notifikasi media sosial, dan konten viral yang mengaburkan realitas. Untuk itu, metode dialog *Sokratik* harus

dihidupkan kembali dalam kelas: bukan guru sebagai sumber jawaban, tetapi fasilitator pertanyaan.

Dalam dialog semacam ini, siswa diajak menelusuri kebenaran melalui pertanyaan reflektif dan pengujian ide—bukan menerima pengetahuan sebagai dogma. Metode ini sejalan dengan gagasan metakognisi, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang pikiran sendiri: menyadari bagaimana kita sampai pada suatu kesimpulan, dari mana asumsi kita berasal, dan bagaimana cara kita bisa keliru. Penelitian menunjukkan bahwa latihan metakognitif secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam situasi informasi kompleks.

Seorang guru fisika di Surabaya, misalnya, mengimplementasikan metode ini dengan meminta siswa merancang eksperimen sederhana untuk membuktikan hukum Archimedes, lalu membandingkannya dengan video eksperimen di YouTube yang berbeda hasilnya. Siswa kemudian diminta mendiskusikan apakah perbedaan itu berasal dari data, alat, atau interpretasi. Melalui proses ini, mereka tidak hanya belajar hukum fisika, tetapi juga belajar bagaimana sains bekerja sebagai proses korektif yang terbuka terhadap perbaikan, sebagaimana diajarkan Popper.

8. Pendekatan Interdisipliner dan Pedagogi Kritis

Tantangan *post-truth* tidak dapat diatasi oleh satu disiplin ilmu saja. Dalam menghadapi kompleksitas wacana publik, diperlukan pendekatan interdisipliner seperti *Science and Technology Studies* (STS), yang tidak hanya mengajarkan isi sains, tetapi juga bagaimana sains diproduksi, dikritik, dan digunakan dalam masyarakat. Dengan pendekatan STS, siswa diajak memahami bahwa fakta ilmiah tidak lahir

dalam ruang hampa, tetapi selalu terkait dengan struktur sosial, nilai, dan kekuasaan.

Paulo Freire menekankan pentingnya pedagogi kritis sebagai pendidikan yang membebaskan: siswa bukan objek yang diisi pengetahuan, melainkan subjek aktif yang membentuk makna. Pendidikan, menurut Freire, harus menjadi dialog antara pengalaman hidup dan struktur pengetahuan—dengan begitu, siswa tidak hanya memahami dunia, tetapi juga mampu mengubahnya. Dalam konteks *post-truth*, pendekatan ini berarti siswa harus diajak menganalisis: siapa yang menyebarkan narasi tertentu? Apa tujuannya? Informasi apa yang disembunyikan?

Sebuah studi kasus di Yogyakarta menunjukkan hasil menarik: ketika siswa SMA diajak membedah hoaks seputar vaksin COVID-19 dari segi data medis, kepentingan politik, dan etika publik, sebagian besar siswa menyatakan mereka merasa “lebih memahami mengapa kebenaran itu penting untuk kehidupan bersama.” Ini bukan hanya hasil kognitif, tetapi perubahan epistemologis: siswa sadar bahwa pengetahuan bukan hal netral, melainkan ruang perjuangan antara wacana yang bersaing.

9. Komunitas Belajar Ilmiah dan Peran Guru sebagai Fasilitator Epistemik

Karl Popper dalam *The Open Society* menyatakan bahwa ilmu hanya bisa hidup dalam masyarakat terbuka yang memungkinkan kritik dan revisi. Dalam konteks pendidikan, ini berarti ruang kelas harus menjadi komunitas belajar yang hidup—tempat siswa bebas mengajukan pertanyaan, mengkritik asumsi, dan membangun pengetahuan secara kolektif.

Peran guru dalam komunitas ini bukan sebagai “otoritas epistemik tertinggi”, melainkan sebagai fasilitator epistemik: pengarah, penghubung, dan penjaga iklim intelektual yang sehat. Guru tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga menunjukkan bagaimana konsep itu lahir, diuji, dan bisa gugur. Polanyi menyatakan bahwa pengetahuan selalu berakar dalam komunitas, dan bahwa *tacit knowledge*—pengetahuan yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan—menjadi kekuatan besar dalam proses pembelajaran.

Dalam praktik, guru dapat memulai kelas dengan pertanyaan terbuka: “Siapa yang bisa membantah ini?” atau “Apakah ada teori lain yang menjelaskan fenomena ini lebih baik?” Dengan demikian, guru menciptakan ekosistem di mana berpikir ilmiah menjadi kultur, bukan kewajiban. Strategi ini memperkuat loyalitas epistemik siswa pada proses penalaran, bukan pada tokoh atau sumber tertentu.

Strategi Menghadapi Tantangan *Post-truth* dalam Dunia Pendidikan

Menghadapi era *post-truth*, pendidikan tidak bisa lagi bersandar pada pendekatan transmisi informasi. Informasi kini hadir dalam jumlah berlebihan dan kualitas yang bervariasi. Tantangan terbesar bukan sekadar bagaimana menyampaikan informasi yang benar, tetapi bagaimana membentuk kesadaran epistemik, yaitu keberanian untuk berpikir mandiri, kemampuan menyaring informasi, dan komitmen terhadap pencarian kebenaran.

Oleh karena itu, strategi pendidikan di era ini harus bersifat transformasional, bukan hanya instruksional. Strategi ini mencakup reformasi kurikulum, pendekatan pedagogis yang reflektif, pelatihan guru yang membumi dalam filsafat ilmu, serta penciptaan iklim sekolah yang mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis.

1. Integrasi Literasi Kritis dan Filsafat Ilmu ke dalam Kurikulum

Literasi kritis bukan sekadar keterampilan membaca dengan cermat, tetapi kemampuan untuk menganalisis struktur kekuasaan dalam wacana, mempertanyakan klaim, serta mengenali bias dalam informasi. Dalam kurikulum, literasi kritis seharusnya tidak hanya diajarkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia atau PPKn, tetapi juga harus masuk ke pelajaran IPA, IPS, bahkan Matematika.

Sebagai contoh, dalam pelajaran Biologi, siswa dapat diajak menganalisis bagaimana informasi seputar vaksin disebar di media sosial. Mereka membandingkan antara data WHO dan narasi viral anti-vaksin. Guru lalu membimbing mereka untuk mengevaluasi sumber, melihat metode penelitian, dan memahami bagaimana kebenaran ilmiah dikonstruksi. Pendekatan ini menggabungkan filsafat ilmu Popperian (falsifikasi), refleksi epistemik Kantian, dan kesadaran ideologis Freirean secara langsung dalam praktik pendidikan.

Di sisi lain, filsafat ilmu bisa diperkenalkan secara bertahap, bahkan sejak SMP. Misalnya, guru dapat mengajak siswa berdiskusi tentang pertanyaan seperti “Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar?” atau “Apa perbedaan antara pengetahuan dan keyakinan?” Diskusi semacam ini memicu kesadaran bahwa ilmu bukan hanya kumpulan fakta, tapi proses berpikir rasional yang melewati tahap keraguan, pembuktian, dan pengujian terus-menerus.

2. Reformasi Pedagogi: Dari Penghafal Menjadi Penalar

Model pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kini menjadi kontraproduktif. Siswa perlu dibimbing untuk mengalami proses berpikir ilmiah, bukan sekadar mendengar hasilnya. Guru perlu menerapkan metode dialog *Sokratik*, di mana siswa diminta menjawab pertanyaan terbuka dan mendefinisikan ulang pandangannya sendiri.

Misalnya, dalam pelajaran Sejarah, siswa tidak cukup tahu “apa yang terjadi dalam Perang Dunia II”. Mereka perlu ditanya: “Mengapa sejarah ditulis seperti itu?”, “Bagaimana sumber sejarah berbeda menghasilkan narasi berbeda?”, “Siapa yang diuntungkan dari narasi tertentu?” Dengan bertanya, siswa diajak untuk menelusuri relasi kekuasaan dalam produksi pengetahuan, sesuai semangat Freire bahwa pendidikan adalah alat pembebasan dari dominasi naratif.

Metode pembelajaran berbasis *inquiry* (inkuiri) juga sangat penting: siswa merancang proyek mini penelitian, mengumpulkan data, membuat hipotesis, dan menyimpulkan hasilnya. Mereka belajar bahwa pengetahuan ilmiah tidak datang dari dogma, tapi dari upaya memahami, mengkritisi, dan merevisi.

3. Penguatan Peran Guru sebagai Fasilitator Epistemik

Dalam dunia *post-truth*, guru tidak boleh lagi berperan sebagai “sumber kebenaran tunggal”. Sebaliknya, guru harus menjadi fasilitator epistemik, yaitu pembimbing yang membantu siswa menelusuri jalur pengetahuan secara rasional. Hal ini menuntut pelatihan guru berbasis filsafat ilmu dan pedagogi kritis.

Guru perlu memahami kerangka kerja ilmu: bagaimana teori dibangun, bagaimana data diverifikasi, bagaimana interpretasi diperdebatkan. Misalnya, dalam pelatihan guru IPA, tidak cukup hanya mengajarkan prosedur laboratorium, tetapi perlu juga mengajarkan mengapa metode ilmiah penting, bagaimana membedakan ilmu dari *pseudosains*, serta bagaimana menanggapi siswa yang membawa argumen dari video YouTube konspiratif.

Guru juga harus menciptakan budaya kelas yang terbuka pada kesalahan. Seperti yang ditegaskan Karl Popper, ilmu bergerak maju justru karena terbuka terhadap pembantahan. Guru yang menerima

kesalahan siswa sebagai peluang berpikir—bukan kegagalan—akan mendorong suasana belajar yang sehat dan penuh rasa ingin tahu.

4. Klaim Sekolah sebagai Komunitas Ilmiah

Sekolah seharusnya dibentuk sebagai komunitas berpikir ilmiah, bukan tempat menghafal tanpa makna. Kegiatan seperti klub diskusi, debat antar kelas, proyek lintas mata pelajaran, atau pameran ilmiah, perlu diberi ruang besar. Budaya ilmiah tidak tumbuh dalam satu pelajaran, melainkan melalui praktik sehari-hari.

Misalnya, siswa dapat diminta membedah berita yang viral di media, lalu menuliskan hasil analisis epistemiknya: “Apakah berita ini punya data? Apakah argumennya logis? Siapa sumbernya?” Dengan membiasakan siswa mempertanyakan isi informasi, sekolah menanamkan sikap skeptis yang sehat. Sekolah juga perlu membina kerja sama antar-guru agar pendekatan berpikir ilmiah bersifat lintas bidang: guru Bahasa dan Sosiologi bisa mengajak siswa membongkar framing media; guru Matematika dan Ekonomi mengkaji statistik dalam propaganda politik. Komunitas semacam ini mencerminkan ide Popper tentang *open society*, tempat argumen diuji secara publik dan rasional.

Kesimpulan

Di tengah kekacauan wacana, derasnya disinformasi, dan runtuhnya kepercayaan terhadap ilmu, pendidikan hadir sebagai harapan terakhir. Tantangan *post-truth* bukan sekadar soal informasi keliru—ia adalah persoalan epistemologi yang menyentuh dasar nilai-nilai berpikir manusia.

Filsafat ilmu memberi kita alat untuk melawan krisis ini. Plato mengajarkan pentingnya melepaskan diri dari bayang-bayang ilusi dan mencari bentuk ideal melalui dialog. Kant menegaskan kebebasan berpikir sebagai syarat utama kemanusiaan. Popper mengajarkan bahwa semua teori harus siap

ditumbangkan oleh data. Feyerabend mengingatkan bahwa kreativitas ilmiah membutuhkan pluralitas metode. Dan Freire memanggil kita untuk menyadari bahwa setiap pengetahuan punya muatan ideologi, dan karena itu harus dibebaskan melalui pendidikan kritis.

Maka tugas pendidikan bukan hanya menyampaikan jawaban, tetapi menumbuhkan keberanian bertanya. Pendidikan tidak boleh hanya mendidik menghafal, tetapi membentuk penalar. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, semakin kabur antara fakta dan opini, kita memerlukan warga negara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga jujur dalam berpikir. Karena pada akhirnya, sebagaimana diingatkan oleh para filsuf, menjadi manusia adalah menjadi pencari kebenaran yang tidak pernah selesai.

Daftar Pustaka

- Adinda R. Putri dkk., Pendidikan Pancasila dan Ketahanan Informasi di Era Post-Truth (Polyscopia, 2024).
- Cass R. Sunstein, Republic.com 2.0 (Princeton: Princeton University Press, 2007).
- EuvsDisinfo, Kant, the philosophy of Autonomy, Truth and Peace, July 30, 2021. <https://euvsdisinfo.eu/kant-the-philosophy-of-autonomy-truth-and-peace/#:~:text=Kant%E2%80%99s%20Enlightenment%20philosophy%20is%20known,%E2%80%9D>.
- Garcia-Carmona, Antonio. "The Role of Scientific Thinking in Media Literacy." Science Education International, 2021.
- Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (1781).
- Immanuel Kant, What is Enlightenment? (1784) dalam Practical Philosophy, ed. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
- Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (1959).
- Karl Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963).
- Maharsi, "Menghindari Berita Hoaks dengan Cara Berpikir Filsafat," 2023.

- Michael Polanyi, *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy* (Chicago: University of Chicago Press, 1958).
- Miranda Fricker, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing* (Oxford: Oxford University Press, 2007).
- Muhammad Nur Huda & Yunia Tiara Riski, "Menghindari Berita Hoaks dengan Cara Berpikir Filsafat," Maharsi (2023).
- Oxford Dictionaries, Word of the Year 2016, <https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016>.
- Parker, "Post-Truth and the Rhetoric of 'Following the Science'," *Journal of Philosophical Studies* (2023).
- Paul Feyerabend, *Against Method* (London: Verso, 1975).
- Plato, *Republik* (Athena: Ca., sekitar 360 SM).
- Plato, *Republic*, trans. G. M. A. Grube (Indianapolis: Hackett, 1992), Book VII.
- Popper, K. R. (1963). *Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge*. Rshan Mohammed et al., "Addressing Post-Truth in the Classroom," *Teaching & Learning Inquiry* 11(3), 2024.
- Shan Mohammed et al., "Addressing Post-Truth in the Classroom," *Teaching & Learning Inquiry* 11(3), 2024.
- Thornton, S. (2023). Karl Popper. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2023 Edition). <https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/popper/>.
- Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1970).
- "Understanding and Coping with the 'Post-Truth' Era," CSSN Report (2020).
- Werner Jaeger, *Paideia: The Ideals of Greek Culture* (Oxford: Oxford University Press, 1945).
- Zainul Adzfar & Badrul Munir Chair, "Kebenaran di Era Post-Truth dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah," *Fikrah* (2023).